



# PUSPARAGAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

*Di Berbagai Negara*

Editor :  
M. Khoiri  
Monica Tiara  
Zaid Bin Ahmad  
Arisman Trisno  
Abd. Rahman

---

Editor Ahli :  
Dr. Isnarmi Moeis, M.Pd, MA.

---

---

# PUSPARAGAM

## PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

### di Berbagai Negara

---

**Editor :**

M. Khoiri  
Monica Tiara  
Zaid Bin Ahmad  
Arisman Trisno  
Abd. Rahman

**Editor Ahli :**

Dr. Isnarmi Moeis. M.Pd., M.A



GRE PUBLISHING

Road Abroad

---

**PUSPARAGAM  
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  
di berbagai Negara**

---

**Editor Ahli : Dr. Isnarni Moels. M.Pd., M.A**  
**Design Cover dan Tata Letak : Marwan & Gun**

**Penerbit**  
**GRE PUBLISHING**  
**Jln. Magelang Km. 3**  
**Gang Margo Agung Karangwaru Lor TR II/417C**  
**Yogyakarta - 55241**  
**<http://grepublishing.com>**

**Cetakan 2017**  
**ISBN 978 - 602 - 7677 - 34 - 0**

---

**Dilarang keras mereproduksi sebagian atau seluruh isi buku ini, dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, serta memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari penerbit**

**© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur atas limpahan rahmat Allah SWT, dengan izin dan ridho-Nya lah penyusunan buku ini dapat diselesaikan dengan sebaik – baiknya. Buku ini merupakan kumpulan dari makalah – makalah mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UNP (Universitas Negeri Padang) khususnya bagi mata kuliah “Perbandingan Pendidikan Kewarganegaraan” yang di ampu oleh dosen mata kuliah Perbandingan Pkn **Dr. Isnarmi Moeis, M.Pd, MA**. Mata kuliah ini bertujuan untuk melakukan kajian mengenai Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) yang juga diselenggarakan oleh negara – negara di dunia, Pendidikan Kewarganegaraan di Eropa, Pendidikan Kewarganegaraan di Amerika, Pendidikan Kewarganegaraan di Afrika, Pendidikan Kewarganegaraan di Asia dan Asia Tenggara. Pentingnya praktek pendidikan kewarganegaraan di kawasan dunia tersebut dapat menjadi sebuah konstruksi pengetahuan tentang pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara di dunia.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan mahasiswa dan mendukung tercapainya kompetensi tersebut, buku ini diterbitkan. Secara garis besar buku ini membahas Pendidikan Kewarganegaraan dari berbagai negara di antaranya Australia, Jepang, India, Finlandia, Belanda, Kamboja, Portugal, Thailand, Inggris, Malaysia, China, Turki, Korea Selatan, Norwegia, Nigeria, Pakistan, Mesir, Kanada.

Besar harapan penulis secara bersama, dengan diterbitkannya buku ini diharapkan akan membentuk konstruksi pengetahuan dan membentuk sebuah paradigma mengenai

Pendidian Kewarganegaraan di berbagai negara di dunia. Buku ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi mahasiswa khususnya dan bagi masyarakat serta akademisi pada umumnya, serta dapat membuka cakrawala berfikir bersama mengenai konsepsi Pendidikan Kewarganegaraan yang nantinya dapat berdampak positif bagi keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akhirnya, kami sampaikan terimakasih kepada pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses penyusunan naskah buku ini. Harapan kita bersama semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan pada umumnya dan bagi mata kuliah Perbandingan Pendidikan Kewarganegaraan secara khususnya. Dengan segenap kerendahan hati penulis bersama memohon maaf yang sebesar – besarnya apabila terdapat kesalahan dalam buku ini, kritik dan saran dari semua pihak tentunya diharapkan demi perbaikan kualitas buku ini.

Padang , 2 Juni 2017  
Kaprodi S2 PPKn FIS UNP

**Dr. Maria Montessori M.Ed., M.Si**

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar ~ iii

Daftar Isi ~ v

Kebijakan dan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di  
Australia

*Muhammad Khoiri* ~ 1

Dimensi Pendidikan Multikultural dalam PKn di India

*Zaid Bin Ahmad* ~ 29

Pendidikan Praktis dan Terintegrasi: Pembentukan Karakter  
melalui Civic Education di Jepang

*Monica Tiara* ~ 45

Pendidikan Kewarganegaraan di Finlandia (Sebuah Tinjauan  
Kebijakan Dan Kurikulum Pendidikan)

*Nurhayati* ~ 55

Pendidikan Nilai untuk Warga Negara di Belanda

*Arisman Trisno* ~ 65

Pendidikan Kewarganegaraan di Kamboja: Tantangan dalam  
Pengajaran PKN dan Moral di Sekolah

*Rossy Hardiyanti* ~ 81

Pendidikan Kewarganegaraan di Portugal

*Mutia Dira ~ 89*

Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Thailand

*Liya Atma Winaya ~ 97*

Pendidikan Kewarganegaraan di Malaysia Kajian Kurikulum PKN

*Abd. Rahman ~ 109*

Sejarah Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Negara Inggris PKN di Inggris

*Fuad Alghi Fahri ~ 125*

Esensi Pendidikan Kewarganegaraan: “Pendidikan Moral dan Ideologi Politik China”

*Fadli Ilham ~ 135*

Hak Minoritas dan Kewarganegaraan dalam Negara Turki

*Trisno Muriyanto ~ 151*

Pendidikan Kewarganegaraan yang Terintegrasi dalam Pendidikan Moral

*Nova Hendri ~ 159*

Pendidikan Kewarganegaraan: Gambaran Multikulturalisme di Norwegia

*Heriyanto ~ 169*

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Dimensi Perdamaian di Nigeria

*Ramadhani Harni ~ 179*

Pendidikan Kewarganegaraan di Pakistan: Telaah Kurikulum  
Pendidikan Kewarganegaraan di Pakistan  
*Inola Anwar - 197*

Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Mesir  
*Sri Hamdani - 211*

Pendidikan Kewarganegaraan di Kanada  
*Randi Ade Saputra - 225*

**Profil - 239**

---

# KEBIJAKAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI AUSTRALIA

Muhammad Khoiri  
muhammadkhoiry@yahoo.com

---

## PENDAHULUAN

Pada hakikatnya setiap negara – negara di dunia akan selalu mengembangkan konsep yang terbaik dalam mewujudkan tujuan dan cita –cita nasionalnya, terutama di bidang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Setiap Negara tentunya memiliki gagasan serta konsep yang berbeda – beda dalam membentuk warganegaranya masing – masing, yaitu melalui pendidikan yang tepat guna dengan merencanakan konsep kurikulum sebaik mungkin, dalam pelaksanaannya Pendidikan Kewarganegaraan di setiap negara akan selalu berbeda satu sama lainnya, hal tersebut di pengaruhi oleh latar belakang, sejarah, kondisi kebudayaan, ekonomi dan sistem sosial masyarakat yang tidak akan terlepas dari adanya pengaruh – pengaruh politik di setiap Negara.

Secara epistemologis pendidikan kewarganegaraan selalu dipahami dalam konteks konsep civic atau citizenship education dalam wacana pendidikan kewarganegaraan yang demokratis sebagaimana pemikiran tersebut berkembang di berbagai belahan dunia. Hal itu dapat dimaknai bahwa pendidikan (education = educare) merupakan upaya manusia yang sadar tujuan untuk menumbuh kembangkan potensi individu agar menjadi anggota masyarakat, putra bangsa, dan warganegara yang dewasa. Oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana pedagogis dan sosialkultural, yang diterima sebagai unsur peradaban kemanusiaan yang memberikan

kontribusi signifikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana telah dipahami publik akademik universal, civic/citizenship education secara universal "Citizenship education" (UK), termasuk di dalamnya "civic education" (USA) atau disebut juga pendidikan kewarganegaraan (Indonesia), atau "ta'limatul muwwatanahlat tarbiyatul al watoniyah (Timur Tengah) atau "educacion civicas" (Mexico), atau "Sachunterricht" (Jerman) atau "civics" (Australia) atau "socialstudies" (New Zealand) atau "Life Orientation" (Afrika Selatan) atau "People and society" (Hungary), atau "Civics and moral education" di Singapore. Kerr: (1999).

Kementerian Pendidikan Australia memaparkan bahwa hampir seluruh masyarakat dan pemerintahan di Australia saat ini sangat mendukung kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan untuk dimasukkan dalam Kurikulum sebagai Pendidikan utama atau Pendidikan yang penting di Australia, meskipun ada kekhawatiran tentang permasalahan konten yang perlu diajarkan dan saran untuk penambahan konten tertentu, serta perlunya penekanan untuk beberapa konten yang sudah ada sebelumnya. Ada dukungan yang sangat kuat terutama dari *Law Society of Western Australia* dan *Civic Education Reference Group* untuk menjadikan kurikulum pendidikan kewarganegaraan wajib diajarkan pada anak berusia 10 tahun. Namun, ada usulan lain bahwa CCE wajib dipelajari untuk anak berusia 12 tahun. Kewarganegaraan pada umumnya dianggap memiliki tujuan yang menyeluruh untuk mendidik siswa tentang apa artinya menjadi warga negara dan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat. Sebuah definisi yang komprehensif disampaikan oleh *Constitution Education Fund*: Pendidikan kewarganegaraan adalah proses pembelajaran formal maupun informal tentang warisan politik dan sosial Australia, sistem pemerintahan, proses dan nilai-nilai demokrasi, administrasi publik, serta sistem peradilan. Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan mempromosikan pengetahuan tentang warisan demokrasi Australia, lembaga-lembaga politik dan hukum, serta masyarakatnya sehingga generasi muda dapat berpartisipasi dan mendapatkan informasi sebagai warga negara. Hal ini juga mendorong pembentukan keterampilan, nilai-nilai,

dan watak kewarganegaraan aktif yang akan membantu mereka untuk berpartisipasi dalam komunitas dan dalam kehidupan demokrasi Australia.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mendeskripsikan mengenai kebijakan dan pembelajaran PKn di Australia. Alasan dan dasar penulis memilih Australia sebagai fokus utama dalam mengulas pendidikan kewarganegaraan karena Australia merupakan subjek yang menarik. Australia merupakan Negara yang mendeklarasikan Tujuan Pendidikan kewarganegaraan untuk generasi muda, yang dikeluarkan oleh Menteri Australia pada 5 Desember 2008, memuat komitmen untuk mendukung pemuda Australia untuk menjadi warga Negara aktif dan warga negara informatif. Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua pemuda Australia dapat berkontribusi pada pembaharuan demokrasi.

Pada tulisan ini, penulis berusaha mengkaji pendidikan kewarganegaraan di Australia melalui beberapa pokok kajian, yaitu: Bagaimana Perkembangan PKn di Australia ?, Kebijakan dan Kurikulum PKn di Australia ?, Pro kontra dan Prospek Pkn di Australia ? saat ini dan perkembangannya di masa mendatang.

## **PEMBAHASAN**

### **A. PKn di Australia : Awal Perkembangan**

Australia merupakan Negara monarki konstitusional dengan pembagian kekuasaan federatif. Pemerintah Australia menganut sistem parlementer dengan Ratu Elizabeth II sebagai puncak kepemimpinannya. Kennedy (2008) menjelaskan bahwa kebangkitan Pendidikan Kewarganegaraan (CCE) di Australia dimulai pada sekitar tahun 1997 an yang mendapatkan dukungan dari mayoritas partai politik dan segala level pemerintahan. Politik Australia pada awal tahun 1990-an di bawah pemerintahan Perdana Menteri Paul Keating siap membuka diri dan mulai mempersiapkan diri untuk menjadi

negara republik sejalan dengan rekonsiliasi dengan Negara-negara Asia dan turut andil dalam kehidupan global. Namun hal ini tidak terlaksana ketika pada tahun 1996, Perdana Menteri Paul Keating digantikan oleh Koalisi Konservatif di bawah pimpinan John Howard. Pemerintahan Australia lalu kembali lagi merujuk pada sistem pemerintahan tahun 1950-an yang terpengaruh oleh sistem pemerintahan Inggris dan Eropa. Perubahan situasi politik yang terjadi di Australia ternyata juga mempengaruhi kebijakan pemerintah, termasuk juga kebijakan pemerintah mengenai CCE atau PKn di Australia

Dua situasi politik yang cukup mempengaruhi arah kebijakan publik Pemerintah Australia pada tahun 2000-an adalah Pengeboman WTC pada tanggal 11 September 2001 di New York dan Bom Bali pada 12 Oktober 2002. Kejadian tersebut mendorong Pemerintahan untuk mempertimbangkan pendekatan tradisional konservatif untuk menciptakan stabilitas pemerintahan dan keamanan Negara. Setelah dua kejadian yang cukup mengejutkan dunia internasional tersebut, Australia juga terlibat dalam dua peperangan yaitu Perang Afganishtan dan Iraq dan ikut juga andil dalam operasi perdamaian PBB di Kawasan Timor - Timor dan Kepulauan Solomon. Imbas sosial yang terjadi di berbagai negara setelah kejadian 11 September 2001 di New York cukup beragam. Sejak saat itu, kaum muslim mendapatkan tekanan yang cukup besar dari dunia internasional. Ketakutan terhadap Islam (*Islamophobia*) muncul di berbagai negara, termasuk Australia. Namun di sisi lain, kejadian tersebut juga membuka mata dunia akan perlunya penghargaan akan hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang diusung oleh demokrasi liberal. Hak-hak asasi yang menjadi cukup sering dibicarakan pasca kejadian 11 September 2001 adalah hak hidup, hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum, asas praduga tak bersalah, serta hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan tanpa memandang agama maupun ras yang dianut.

Keprihatinan akan situasi sosial politik yang terjadi setelah kejadian 11 September 2001 ini kemudian mendorong lahirnya kalangan *Neo-Conservative* di Australia “berkembangnya PKn” di Australia. Gerakan kaum konservatif

ini bahkan kemudian meluas dan secara fundamental merubah ranah politik dan sosial di Australia, terutama setelah terpilihnya Perdana Menteri Ruud Labor . Dinamika politik pada negara Australia inilah yang cukup menarik untuk dijadikan bahan kajian, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan kewarganegaraan serta pendidikan kewarganegaraan di Australia.

Kampanye Australia untuk menghidupkan kembali kewarganegaraan pendidikan pada masa pemerintahan Paul Keating telah sering disajikan sebagai bentuk awal kewarganegaraan baru. Sebuah pendekatan untuk mendorong demokrasi kewarganegaraan yang dapat dibedakan dari kewarganegaraan lama (Dickson, 1998: 56-57). Meskipun perbedaan antara pendidikan kewarganegaraan yang lama dan yang baru dalam ranah pendidikan kewarganegaraan di Australia tidak tepat, namun sebutan ini adalah titik awal yang cukup berguna untuk menguji perbedaan orientasi politik dan nilai program dalam pendidikan kewarganegaraan di Australia (Howard, 2006: 462).

Pendidikan kewarganegaraan di negara ini telah berumur lebih dari satu abad, dan merupakan bagian penting dari kurikulum dalam sistem sekolah Australia sampai 1950-an. Namun, Pendidikan Kewarganegaraan tidak pernah jelas didirikan sebagai subjek independen dan memiliki batas-batas disiplin ilmu yang ambigu (Thomas, 1994: 162).

## **B. Kebijakan Pemerintah dan Kurikulum PKn di Australia**

Pendidikan Kewarganegaraan saat ini telah menjadi mata pelajaran yang utama dan penting dalam Kurikulum Pendidikan di Australia, meskipun ada kekhawatiran tentang permasalahan konten yang perlu diajarkan dan saran untuk penambahan konten tertentu, serta perlunya penekanan untuk beberapa konten yang sudah ada sebelumnya. Ada dukungan yang sangat kuat terutama dari *Law Society of Western Australia* dan *Civic Education Reference Group* untuk menjadikan

kurikulum pendidikan kewarganegaraan wajib diajarkan pada anak berusia 10 tahun. Namun, ada usulan lain bahwa CCE wajib dipelajari untuk anak berusia 12 tahun. Kewarganegaraan pada umumnya dianggap memiliki tujuan yang menyeluruh untuk mendidik siswa tentang apa artinya menjadi warga negara dan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat.

Sebuah definisi yang komprehensif disampaikan oleh *Constitution Education Fund*: Pendidikan kewarganegaraan adalah proses pembelajaran formal maupun informal tentang warisan politik dan sosial Australia, sistem pemerintahan, proses dan nilai-nilai demokrasi, administrasi publik, serta sistem peradilan. Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan mempromosikan pengetahuan tentang warisan demokrasi Australia, lembaga-lembaga politik dan hukum, serta masyarakatnya sehingga generasi muda dapat berpartisipasi dan mendapatkan informasi sebagai warga negara. Hal ini juga mendorong pembentukan keterampilan, nilai-nilai, dan watak kewarganegaraan aktif yang akan membantu mereka untuk berpartisipasi dalam komunitas dan dalam kehidupan demokrasi Australia (Eddington dan Ambrose, 2010: 3) Deklarasi Tujuan Pendidikan untuk Pemuda Australia, yang dikeluarkan oleh Menteri Australia untuk Pendidikan pada 5 Desember 2008, memuat komitmen untuk mendukung pemuda Australia untuk menjadi warga Negara aktif dan warga negara informatif. Kewarganegaraan dan pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua pemuda Australia dapat berkontribusi pada pembaharuan demokrasi berkelanjutan di Australia. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan warga negara aktif yaitu:

- a. Warga negara yang bertindak dengan integritas moral dan etika.
- b. Warga negara yang mampu menghargai perbedaan sosial, budaya,
- c. Bahasa dan keragaman agama di Australia, serta memiliki pemahaman tentang sistem pemerintahan, sejarah, dan budaya Australia.

- d. Warga negara yang mampu memahami dan mengakui nilai adat budaya dan memiliki pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari rekonsiliasi antara kaum adat dan non-adat Australia.
- e. Warga negara yang berkomitmen untuk mewujudkan nilai-nilai nasional demokrasi, pemerataan dan keadilan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sipil Australia. Warga negara yang mampu berhubungan dan berkomunikasi lintas budaya, terutama dengan budaya dan negara-negara Asia.
- f. Warga negara yang mampu bekerja untuk kebaikan bersama serta meningkatkan lingkungan alam dan sosial di Australia (Eddington dan Ambrose, 2010: 3). Lebih lanjut, deklarasi ini menyarankan Pemerintah Persemakmuran untuk bekerjasama dengan semua sektor sekolah dalam mengembangkan kurikulum kelas dunia (*world class curriculum*) yang mendukung generasi muda Australia untuk menjadi warga negara aktif (Eddington dan Ambrose, 2010: 3).

Secara umum deklarasi tersebut mencatat bahwa kurikulum Australia: akan mendukung siswa untuk berhubungan baik dengan orang lain dan menumbuhkan pemahaman masyarakat Australia, kewarganegaraan dan nilai-nilai nasional, termasuk melalui studi Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan. fokus dari dimensi civics dan citizenship education (CCE) di Australia yaitu mendorong dan memandu peserta didik untuk membangun peluang di kelas, sekolah, dan masyarakat, membentuk watak kewarganegaraan, serta mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam lingkungannya. Oleh karena itu, guru diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi siswa untuk dapat berpartisipasi di kelas dan terlibat aktif dalam komunitas masyarakat. Guru juga dapat membantu siswa untuk mempraktekkan pengetahuan dan nilai-nilai dari kurikulum formal, serta membantu mereka untuk membuat koneksi antara kewarganegaraan dan pembelajaran kewarganegaraan menurut pengalaman mereka sendiri.

Partisipasi aktif dalam pembelajaran maupun dalam masyarakat memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan kewarganegaraan serta memberikan mereka kesempatan untuk terlibat dan membentuk nilai-nilai karakter diri dalam interaksi yang bermakna dengan orang lain (Eddington dan Ambrose, 2010: 4).

Adapun strategi yang dilakukan dalam pembelajaran di Australia yaitu:

- a. Praktek kelas yang mendorong pengembangan dan penerapan demokrasi melalui situasi kelas yang demokratis.
- b. Praktek di luar kelas yang mendorong keterlibatan aktif dari semua siswa dalam partisipasi demokratis di sekolah melalui pelatihan kepemimpinan dan peran pengambilan keputusan.
- c. Partisipasi dalam komunitas yaitu dengan membentuk dan mendorong partisipasi siswa dalam pelayanan belajar dan dewan lokal proyek, penggalangan dana, dan kampanye keadilan sosial (Eddington dan Ambrose)

Kurikulum pendidikan Australia pada awal dan pertengahan abad kedua puluh, terfokus pada studi struktur dan proses pemerintahan dari formal dan perspektif konstitusional, dengan tujuan utama untuk meningkatkan pengetahuan dan mendorong pengembangan keterampilan masyarakat sipil. Prioritas CCE adalah mengenai dasar-dasar konstitusional politik, sistem, dan struktur pemerintahan. Dalam hal ini, ranah kontitif pendidikan kewarganegaraan Australia tersebut, bisa dianggap sebagai dasar konstruksi formalistik pendidikan kewarganegaraan (Howard, 2006).

Walau berakar pada nilai-nilai konstitusionalisme liberal, pendidikan kewarganegaraan lama memiliki lebih dari satu wajah politik atau ideologi. Dalam perihal hak-hak warga negara misalnya, konstruksi kewarganegaraan lama sering bersifat sangat konservatif (Print, 1996).

Adapun pendidikan kewarganegaraan pada pertengahan abad kedua puluh tampak dirancang untuk memperkuat *status quo* dengan menetralsir dukungan potensi tantangan perubahan-berorientasi pada politik dan tatanan sosial. Ada upaya untuk membangun masyarakat dan meringankan alienasi politik, sering dicapai melalui proses indoktrinasi yang bertujuan memastikan warga pasif dan diam.

Konsep CCE di Australia pada sebelum periode tahun 1990-an bersifat sempit, formalistik, dan legalistik (Gill dan Reid, 1999). Bidang kewarganegaraan disamakan dengan pemilu, partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan publik yang dibentuk hanya untuk berinteraksi terkait dengan sistem pemilu atau legislatif (Thomas, 1994).

Namun, pada awal tahun 2003, *Ministerial Council on Education, Employment, Training, and Youth Affairs* (MCEETYA) mengadakan kesepakatan untuk mengembangkan instrumen penilaian uji coba pada bidang Pendidikan Kewarganegaraan dengan sampel nasional seluruh siswa kelas 6 dan 10, yang akan dilakukan pada bulan Oktober 2004. Paska kejadian September 2001 dan Oktober 2002, perhatian masyarakat semakin besar akan studi Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan (CCE). CCE lalu dianggap serius dalam kancah pendidikan nasional. Sebagai implikasinya, jika sebelumnya pendidikan kewarganegaraan hanya berfokus pada pemahaman lembaga dan proses kewarganegaraan maka kini, fokus studi kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan diperluas mencakup dua hal yaitu: 1) pemahaman lembaga dan proses kewarganegaraan serta 2) watak dan keterampilan untuk partisipasi. Inilah sebenarnya perbedaan antara wajah kewarganegaraan lama dan baru di Australia. Wajah kewarganegaraan lama hanya berfokus tentang demokrasi Australia, sejarah, tradisi, struktur dan proses; budaya demokrasi; cara masyarakat Australia dikelola, oleh siapa dan untuk apa. Sedangkan wajah kewarganegaraan baru meliputi pengembangan keterampilan, sikap, keyakinan dan nilai-nilai yang akan mempengaruhi siswa untuk berpartisipasi, untuk menjadi dan

tetap terlibat dalam partisipasi politik maupun kehidupan demokrasi (Print, 2010: 26-28)

Pendidikan Kewarganegaraan (CCE) di Australia bukan merupakan subjek pembelajaran khusus sebagaimana yang ada di Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk menghasilkan hasil belajar yang berhubungan dengan berbagai masalah dan keterampilan, sehingga dapat bermakna jika dihubungkan ke area pembelajaran. Untuk memiliki dampak sosial yang lebih besar, maka hasil pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dibangun ke dalam semua kegiatan dan program kurikuler dan ekstrakurikuler. Walau Pendidikan Kewarganegaraan bukan merupakan subjek tersendiri namun tim proyek telah menghasilkan sebuah dokumen yang mendefinisikan domain penilaian. Hal ini telah dilakukan dengan keterlibatan aktif dari para ahli kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dari masing-masing Negara dan Wilayah.

## **1. Kurikulum Formal PKn (CCE) di Australia**

Menanggapi kekhawatiran bahwa tren sosial terkait dengan menurunnya pengetahuan sipil dan keterlibatan yang melemahnya kewarganegaraan demokratis dan mengancam sangat kemungkinan pemerintahan yang demokratis yang bermakna, pendukung pendidikan kewarganegaraan berpendapat bahwa kurikulum revitalisasi pendidikan kewarganegaraan penting dilakukan untuk kebangkitan demokrasi. Ada kesepakatan bahwa pendidikan kewarganegaraan berada di bawah lingkup pendidikan demokrasi. Namun, ketika konten kurikuler dan masalah pedagogis yang menyinggung hal tersebut secara rinci, kesepakatan tentang substansi pendidikan kewarganegaraan berakhir, dan apa yang muncul kemudian adalah berbagai persaingan visi, konten, dan tujuan yang tepat pada pendidikan kewarganegaraan. Dengan kata lain, kesepakatan retorik pada nilai materi pendidikan kewarganegaraan hanya berfungsi untuk menyembunyikan perbedaan pendapat politik yang lebih dalam tentang sifat yang tepat dari pendidikan kewarganegaraan. Pemerintah Australia belum mampu mengikat tujuan pendidikan kewarganegaraan

untuk visi neo-liberal dan menjabarkan posisi Australia dalam kancah global. Adapun dalam konteks kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai keterlibatan kritis dan kewarganegaraan demokratis juga telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat (Davies dan Evan, 2002).

Pada bulan April 1999, Menteri Pendidikan Negara dan Persemakmuran (*Territory and Commonwealth Ministers of Education*) mengadakan pertemuan di Dewan Kesepuluh Menteri Pendidikan, Ketenagakerjaan, Pelatihan dan Urusan Pemuda (*Ministerial Council on Education, Employment, Training and Youth Affairs*), dan menyetujui diterapkannya *National Goals for Schooling in the Twenty-First Century*. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ditegaskan oleh Ministerial Council on Education, Employment, Training, and Youth Affairs (1999) yaitu: menciptakan siswa yang aktif dan memiliki informasi, pemahaman, dan apresiasi terhadap system pemerintahan Australia serta kehidupan kewarganegaraan. Siswa harus memiliki kapasitas untuk melakukan penilaian dan tanggung jawab dalam hal moralitas, etika dan keadilan sosial, dan kemampuan untuk memahami dunia mereka, untuk berpikir tentang bagaimana hal-hal harus menjadi cara mereka, untuk membuat keputusan yang rasional dan informasi tentang kehidupan mereka dan untuk menerima tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Pada rentang tahun 1997-2004, Pendidikan Kewarganegaraan telah dilaksanakan dengan merujuk dan mengadopsi Program *Discovery Democracy*. Proyek ini mendapatkan sokongan dana dari pemerintah sebesar \$32 juta, namun pada kenyataannya, program ini tidak cukup populer di kawasan negara bagian (Kennedy, 2008: 186). Hal ini bisa dilihat dari fakta di lapangan, seperti misalnya di New South Wales, CCE dimasukkan dalam ranah pembahasan mata pelajaran Geografi dan Sejarah dengan fokus pembahasan pada studi sosial dan institusi politik. Atau di Queensland, dimana pendidikan kewarganegaraan terintegrasi dalam Studi Sosial dan Lingkungan dengan lingkup institusi publik, isu-isu lingkungan, proses alam dan sosial, serta pemeliharaan lingkungan (Kennedy, 2008: 186-187).

Konten dari pendidikan formal kewarganegaraan di Australia merujuk pada ketentuan *Ministerial Council on Education, Employment, Training, and Youth Affairs* (2003) yaitu meliputi:

- a. Warisan demokrasi Australia, sistem pemerintahan dan hukum negara
- b. Identitas Nasional Australia dari masa ke masa, keragaman budaya, serta kepaduan sosial.
- c. Kemampuan, nilai-nilai, serta partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara

Sedangkan penilaian Civics dan Citizenship meliputi dua domain penilaian yaitu: pengetahuan dan pemahaman akan institusi kewargaan dan prosesnya (*knowledge and understanding of civic institution & processes*) serta watak dan kemampuan individu untuk berpartisipasi (*disposition and skills for participation*). Adapun konsep dan konten Civics dan Citizenship telah jelas digambarkan dalam Materi Kurikulum *Discovery Democracy*. Materi kurikulum tersebut bisa dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Materi Kurikulum *Discovering Democracy*

Tema	Sekolah Dasar	Sekolah Menengah			
		Units			
		Menengah	Atas	Bawah	Menengah
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Siapa yang memerintah?</li> <li>- Hukum dan Peraturan Negara Australia</li> <li>- Warga Negara Dan Kehidupan Publik</li> <li>• Masing-masing tema terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsep Mengenai masyarakat dan penguasa</li> <li>- Aturan dan hukum</li> <li>- Kita Mengingat</li> <li>- Bergabung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parlemen vs Monarki</li> <li>- Peraturan dan hukum</li> <li>- Masyarakat membentuk bangsa</li> <li>- Kekuasaan Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Haruskah masyarakat mengatur?</li> <li>- Hukum Perebutan Demokratis</li> <li>- Kaum laki-laki dan wanita dalam kehidupan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partai mengatur parlemen</li> <li>- Hak Asasi Manusia</li> <li>- Demokrasi dihancurkan</li> <li>- Mendirikan sebuah bangsa</li> <li>- Menyelesaikan masalah</li> <li>- Jenis Negara apa.</li> </ul>	
		<i>Australian Readers</i>			

<p>dengan Negara bagian dan kebutuhan kurikulum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panduan Guru untuk masing-masing <i>Units</i> dan <i>Readers</i></li> <li>• Panduan Hukum dan Pemerintahan Australia untuk Guru</li> </ul>	<p>Pemerintah yang baik dan yang buruk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hidup dengan aturan dan hukum</li> <li>• Kita warga Australia</li> <li>• Kalau-kalau kita lupa</li> <li>• Tetangga yang baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebebasan, persamaan, persaudaraan</li> <li>• Ini negara saya</li> <li>• Pahlawan sejati</li> <li>• Dari hal yang kecil ke yang besar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siapa yang seharusnya mengatur?</li> <li>• Ketika hukum jatuh</li> <li>• Ceritacerita yang kita sampaikan tentang diri kita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat politik</li> <li>• Hukum dan keadilan</li> <li>• Kesetaraan dan perbedaan</li> </ul>
---	---	---	---	--

(Kennedy, 2008: 186-187)

Adapun buku teks dan materi pendukung pendidikan kewarganegaraan di Australia bisa dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Buku Teks/Material Pendukung untuk Civic dan Citizenship

Modul	Jabaran	Tingkat Sekolah
Ready, set, go Right and responsibilities	Kultur dan identitas Sistem, sumber, dan kekuasaan	1
Read all about it: participating	Kultur dan identitas Sistem, sumber, dan kekuasaan Kontinuitas waktu dan perubahan	2
Citizen then and now: beginning of democracy	Kultur dan identitas Sistem, sumber, dan kekuasaan	3
Everyone can have a say: local decision making	Tempat dan waktu Sistem, sumber, dan kekuasaan Kontinuitas waktu dan perubahan	3

Our rights: origins of Australian democracy	Sistem, sumber, dan kekuasaan Kontinuitas waktu dan perubahan	4
Active citizens, Australian governments: Australia democracy	Sistem, sumber, dan kekuasaan	4
The federation of Australia: Federation	Kultur dan identitas Sistem, sumber, dan kekuasaan Kontinuitas waktu dan perubahan	4
Law and the media: civics and Citizenship	Kultur dan identitas Sistem, sumber, dan kekuasaan Kontinuitas waktu dan perubahan	5
Government and citizens: independent study	Kultur dan identitas Tempat dan waktu Sistem, sumber, dan kekuasaan Kontinuitas waktu dan perubahan	6
The global citizen: ecology and Economy		6
Potentials of democracy: civics and citizenship	Kultur dan identitas Sistem, sumber, dan kekuasaan Kontinuitas waktu dan perubahan	6

(Kennedy, 2008: 186-187).

### C. Perkembangan PKn Australia : Saat Ini dan Masa Depan

Pendidikan kewarganegaraan ini telah diperkenalkan oleh pemerintah di berbagai negara dan perbandingan internasional termasuk di Australia untuk menambah wawasan yang berguna dalam rangka memahami berbagai isu kewarganegaraan, termasuk pengembangan kebijakan serta pelaksanaan inisiatif baru dengan mengacu pada pengembangan

profesional dan belajar siswa (misalnya Torney-Purta et al., 2001). Ian Davies berpendapat bahwa pengenalan pendidikan kewarganegaraan secara umum merupakan reaksi kebutuhan yang dirasakan untuk menanggapi hubungan politik baru baik di dalam maupun antar Negara dan keinginan untuk mengembangkan lebih banyak pengetahuan serta partisipasi aktif dalam norma-norma sosial yang ada. Pemerintah Australia telah mendukung penerapan kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di sekolah melalui *Discovering Democracy* (1997- 2004), selanjutnya *Civics and Citizenship Education (CCE) Program* (sejak 2004), dan *the Parliament and Civics Education Rebate (PACER) Program* (sejak 2006). *Discovering Democracy* merupakan salah satu perkembangan yang mendasar dalam CCE di Australia. Materi ini diajarkan untuk sekolah dasar (*primary school*) dan sekolah menengah (*middle school*). Panduan *Discovering Democracy* dan pelatihan pengembangan guru profesional dilakukan di semua negara dan wilayah teritorial Australia untuk memastikan kesuksesan program *Discovering Democracy* tersebut.

Guru diberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai konsep dan materi *Discovering Democracy*, sehingga mampu terlibat dalam pendekatan pedagogis untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang lembaga-lembaga demokrasi, sejarah, nilai-nilai, dan proses demokrasi di Australia. Pada bulan April 1999, Menteri Pendidikan Negara dan Persemakmuran (*Territory and Commonwealth Ministers of Education*) mengadakan pertemuan di Dewan Kesepuluh Menteri Pendidikan, Ketenagakerjaan, Pelatihan dan Urusan Pemuda (*Ministerial Council on Education, Employment, Training and Youth Affairs*), dan menyetujui diterapkannya *National Goals for Schooling in the Twenty-First Century*. Hasil referensi ini menghasilkan dua tujuan yaitu: 1) Siswa harus memiliki kapasitas untuk melakukan penilaian serta bertanggung jawab dalam hal moralitas, etika, dan keadilan sosial, memiliki kemampuan untuk memahami dunia mereka, untuk berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri, membuat keputusan yang rasional dan mendapatkan informasi tentang kehidupan mereka, serta menerimatanggung

jawab atas tindakan mereka sendiri; 2) Ketika siswa meninggalkan sekolah, mereka harus menjadi warga negara yang aktif dan memiliki pemahaman serta apresiasi terhadap sistem pemerintahan Australia dan kehidupan masyarakat sipil (Ministerial Council on Education, Employment, Training and Youth Affairs, 1999: 15).

## **1. Masalah dan Tantangan dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Australia**

Dari hasil kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa masalah maupun tantangan yang terdapat dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Australia yaitu:

- a. Jika ditinjau dari kebijakan yang diambil oleh masing-masing negara bagian terkait dengan pembelajaran CCE maka bisa disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan masih belum merupakan kebutuhan utama untuk siswa di Negara Australia. Oleh karena itu, perlu perhatian yang lebih serius mengenai penerapan maupun pengembangan kajian pendidikan kewarganegaraan di Australia.
- b. Belum adanya kepercayaan dan kemantapan dari masing-masing sekolah untuk memutuskan manakah yang harus dan yang tidak seharusnya dimasukkan dalam program pendidikan kewarganegaraan.
- c. Konten dari Pendidikan Kewarganegaraan yang termuat dalam Kurikulum *Discovering Discovery* masih bersifat lokal. Perlu adanya pengadopsian dan penambahan nilai-nilai global ke dalam materi kurikulum.
- d. Imigrasi dan dan isu-isu mengenai keragaman yang meningkat di seluruh negara merupakan tantangan dalam perkembangan asimilasi dan konsepsi kewarganegaraan (Bank, 2004: 4-8). Maka dari itu, perlu adanya perhatian lebih mengenai isu-isu keberagaman ras, budaya, etnik, agama, bahasa, kewarganegaraan, hak asasi manusia, demokrasi, dan pendidikan.

- e. Mengingat era perkembangan global yang sangat pesat, maka perlu diajukan penambahan beberapa materi yang terkait dengan dinamika politik seperti: demokrasi, keragaman, globalisasi, pembangunan berkelanjutan, sistem kekuasaan, prasangka/diskriminasi/dan rasisme, migrasi, identitas kelompok, perbedaan pendapat, patriotism, dan kosmopolitanisme.

## **2. Masa Depan Pembelajaran Civic dan Citizenship Education (CCE) di Australia**

Ada dua kemungkinan mengenai masa depan CCE di Australia. Yang pertama yaitu kemungkinan dimasukkannya CCE dalam Kurikulum Pembelajaran di Australia (Ministerial Advisory Committee for Educational Renewer, 2006; Australian Government Department of Education, 2014) atau dimasukkannya CCE sebagai subjek kajian sejarah untuk memperluas dan merepresentasikan Australia pada komunitas masyarakat. Subjek dari CCE merupakan siswa pada kelas 6 dan 10 (Kennedy, 2008: 193). Namun, ada usulan lain bahwa pendidikan kewarganegaraan wajib dipelajari untuk anak berusia 12 tahun saja (Australian Government Department of Education, 2014: 171) Sedangkan jika mengkaji dari sisi konten kewarganegaraan maupun pendidikan kewarganegaraan, maka di masa mendatang, Guru dituntut tidak hanya memfokuskan pembelajaran pada isu-isu lokal maupun nasional namun juga menaruh perhatian pada dinamika dan perkembangan isu-isu global (Kennedy, 2008: 193).

## **3. Perbandingan Kualitas Lulusan (*Australia Benchmarking*)**

Belum ada tolok ukur perbandingan kualitas lulusan Australia disandingkan dengan kualitas lulusan negara lain yang secara khusus menilai pencapaian siswa (target) dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Studi komparasi mengenai kualitas lulusan dalam bidang studi *Civics and*

*Citizenship* dilakukan oleh ICCS (*International Association for the Evaluation of Educational Achievement*) tetapi Australia tidak masuk menjadi objek penelitian, karena studi ICCS dilakukan di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika Latin saja. Adapun kemampuan sosial siswa untuk memecahkan masalah (*problem solving*), yang merupakan salah satu kemampuan (*skill*) dalam pembelajaran *Civics & Citizenship Education*, telah menjadi salah satu bahan komparasi kualitas lulusan peserta didik dengan kualitas lulusan negara lain melalui studi khusus PISA (*Programme for International Student Assessment*) pada tahun 2003 dan 2012. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 dan 4.

Tabel 3. Skor PISA pada 40 Negara Tahun 2003 dalam *Problem Solving* (OECD, 2003: 33)

		Main Score	SE	Uper Rank	Lower Rank
1	Korea	550	(3.1)	1	4
2	Hongkong China	548	(4.2)	2	4
3	Finland	548	(1.9)	3	4
4	Japan	547		4	4
			(4.1)		
5	New Zeland	533	(2.2)	5	8
6	Macao – China	532	(2.5)	6	9
7	Australia	530	(2.0)	7	10
8	Liechtenstein	529	(3.9)	8	11
9	Canada	529	(1.7)	9	10
10	Belgium	525	(2.2)	10	12
11	Switzerland	521	(3.0)	11	15
12	Netherland	520	(3.0)	12	15
13	France	519	(2.7)	13	16
14	Denmark	517	(2.5)	14	16
15	Czech Republic	516	(3.4)	15	17
16	Germany	513	(3.2)	16	18
17	Sweden	509	(1.4)	17	19
18	Austria	506	(2.9)	18	20
19	Iceland	505	(2.3)	19	20
20	Hungary	501	(1.4)	20	22
21	Ireland	498	(3.4)	21	22
22	Luxemburg	494	(2.6)	22	24

23	Slovak Republic	492	(2.8)	23	26
24	Norway	490	(3.9)	24	26
25	Poland	487	(2.7)	25	27
26	Latvia	483	(4.6)	26	29
27	Spain	482	(3.1)	27	29
28	Russian Federation	479	(3.9)	28	30
29	United States	477	(3.1)	29	30
31	Portugal	470	(4.0)	30	31
31	Italy	469	(2.7)	31	31
32	Greece	448	(4.6)	32	32
33	Thailand	425	(3.1)	33	34
34	Serbia	420	(3.9)	34	35
35	Uruguay	411	(3.1)	35	36
36	Turkey	408	(4.0)	36	36
37	Mexico	384	(2.7)	37	37
38	Brazil	371	(3.3)	38	39
39	Indonesia	361	(3.7)	39	39
40	Tunisia	345	(6.0)	40	36

(Kennedy, 2008: 186-187).

Tabel 4. Skor PISA pada 44 Negara Tahun 2012 dalam *Problem Solving* (Perkins, Rachel & Shiel, Gerry, 2014: 8)

	Mean	SE	SD	SE	IRL	
1	Singapore	562.4	(1.22)	95.0	(0.96)	▲
2	Korea	561.1	(4.32)	91.2	(1.76)	▲
3	Japan	552.2	(3.14)	85.2	(1.91)	▲
4	Macao China	540.5	(1.02)	79.2	(0.81)	▲
5	Hongkong China	539.6	(3.91)	91.7	(2.20)	▲
6	Shanghai China	536.4	(3.29)	89.9	(2.25)	▲
7	Chinese Taipei	534.4	(2.88)	90.9	(1.93)	▲
8	Canada	525.7	(2.40)	100.3	(1.66)	▲
9	Australia	523.1	(1.92)	97.4	(1.02)	▲
10	Finland	522.8	(2.27)	93.0	(1.21)	▲
11	United Kingdom	516.8	(4.17)	96.7	(2.37)	▲
12	Estonia	515.0	(2.51)	87.5	(1.52)	▲

13	France	511.0	(3.44)	96.2	(4.09)	▲
14	Netherlands	510.7	(4.40)	98.9	(2.99)	▲
15	Italy	509.6	(4.04)	90.7	(2.08)	▲
16	Czech Republic	509.0	(3.12)	95.2	(2.04)	▲
17	Germany	508.7	(3.62)	98.9	(2.47)	▲
18	United States	507.9	(3.90)	90.7	(2.26)	○
19	Belgium	507.7	(2.48)	9.52	(1.82)	▲
20	Austria	506.4	(3.58)	98.5	(2.93)	○
21	Norway	503.3	(3.26)	92.8	(1.92)	○
22	Ireland	498.3	(3.18)	106.5	(1.95)	○
23	Denmark	497.1	(2.29)	93.8	(1.92)	○
24	Portugal	494.4	(3.43)	103.0	(1.60)	○
25	Sweden	490.7	(3.57)	93.1	(1.81)	○
26	Russian Federation	489.1	(4.45)	92.3	(2.01)	▼
27	Slovak Republic	483.3	(4.10)	87.8	(2.75)	▼
28	Poland	480.8	(1.52)	96.2	(3.35)	▼
29	Spain	476.8	(3.10)	87.9	(2.86)	▼
30	Slovenia	475.8	(3.86)	98.0	(1.29)	▼
31	Serbia	473.4	(4.01)	96.5	(1.91)	▼
32	Croatia	466.3	(4.02)	104.4	(1.96)	▼
33	Hungary	459.0	(5.47)	97.1	(2.71)	▼
34	Turkey	454.5	(3.70)	89.1	(2.21)	▼
35	Israel	454.0	(1.45)	92.0	(3.20)	▼
36	Chile	447.9	(4.71)	104.4	(1.68)	▼
37	Cyprus	444.9	(3.52)	79.0	(0.99)	▼
38	Brazil	428.5	(2.76)	123.4	(2.37)	▼
39	Malaysia	411.2	(1.16)	85.9	(1.98)	▼
40	United Arab Emirates	406.7	(3.47)	98.9	(1.82)	▼
41	Montenegro	403.4	(5.10)	91.8	(1.10)	▼
42	Uruguay	401.7	(3.54)	83.6	(2.00)	▼
43	Bulgaria	399.2	(0.67)	105.5	(3.54)	▼
44	Colombia	500.1	(0.67)	91.6	(1.96)	▼

(Kennedy, 2008: 186-187)

Keterangan:

Mean : *Mean Country/Economy Scores*

SE : *Standar Errors*

SD : *Standard Deviations*

- IRL : *Instructional Reading Levels*  
 ▲ : *Significantly higher than Ireland*  
 ○ : *Not significantly different from Ireland*  
 ▼ : *Significantly lower than Ireland*

Ada tiga studi komparasi lulusan (*benchmarking*) yang saat ini berlaku dan banyak dijadikan acuan yaitu: 1) PISA (*Programme for International Student Assessment*) yang mengukur kemampuan siswa dalam bidang matematika (*mathematics*), ilmu pengetahuan alam (*science*), kemampuan membaca (*reading*), dan kemampuan menyelesaikan masalah (*problem solving*); 2) TIMSS (*Trends in International Mathematics & Science Study*) yang mengukur kemampuan siswa dalam bidang matematika dan *science*; serta 3) PIRLS (*Progress in International Reading Literacy Study*) yang mengukur kemampuan membaca siswa (*reading*). Jika melihat hasil studi komparasi yang dilakukan oleh PISA pada tahun 2003 dan 2012 tentang *problem solving*, maka secara umum kualitas lulusan siswa Australia memiliki kemampuan memecahkan masalah di atas rata-rata (*significantly above OECD average*). Australia bahkan mampu menempati peringkat ketujuh dari 40 negara (2003) dan kesembilan dari 44 negara (2012).

Australia tidak bisa lagi tetap terisolasi sebagai negara yang berkiblat pada kawasan Eropa dengan geografi Asia. Warga Australia di masa depan harus berusaha memahami identitas kewarganegaraan mereka serta kewarganegaraan masyarakat di negara lain; mereka harus mengetahui bagaimana dan kapan diperlukan pengambilan tindakan terkait dengan isu-isu sipil; selain itu, mereka juga harus mengetahui bagaimana lembaga-lembaga demokrasi dapat membantu mereka dalam tugas-tugas ini. Kemajuan telah dibuat pada CCE di Australia selama dekade terakhir dan banyak guru telah merasakan dampak positif dari dukungan pemerintah terhadap pengembangan CCE di Australia. Sekarang saatnya bagi guru untuk memanfaatkan dukungan tersebut seoptimal mungkin untuk pengembangan program yang relevan dan berkelanjutan yang diharapkan dapat

memenuhi kebutuhan dan prioritas baru dalam implementasi CCE. Hal ini merupakan tantangan besar bagi para guru. Keberhasilan mereka dalam menerapkan CCE akan menentukan nasib, moral, dan karakter warga Negara Australia di masa depan serta pengaruh mereka dalam masyarakat global.

#### **D. Pro dan Kontra (*Civic Education and citizenship*) CCE Australia**

##### **PKn di Australia**

Perubahan Situasi Sosial dan Politik Australia, dalam kaitannya dengan Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Pada masa Pemerintahan Perdana Menteri Paul Keating, diluncurkan program pengembangan kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan yang disebut dengan *Discovering Democracy*. Fokusnya adalah untuk memastikan generasi muda untuk sadar akan apresiatif terhadap institusi-institusi pemerintahan serta sadar akan sejarah masa lalu yang membentuk Australia hari ini (Kennedy, 2008: 183). Namun Kemp yang merupakan Profesor Politik di Monash University pada saat itu berdiri menjadi pihak oposisi dan giat melakukan serangan pada Pemerintahan Paul Keating, terkait dengan isu-isu identitas nasional dan wawasan kebangsaan. Kemp menyerang Paul Keating dalam topik mengenai Bendera Australia, konstitusi, dan akhirnya sejarah Negara. Kemp saat itu berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan liberal yang diambil oleh pemerintah Paul Keating terutama dalam kaitannya dengan niat pemerintah untuk merangkul liberalisme dan globalisme, merupakan serangan pada identitas nasional Australia. Kemp beranggapan bahwa kebijakan pemerintah Australia tidak boleh didasarkan pada tren serta perkembangan politik negara lain. Lebih lanjut, Kemp memandang pentingnya penyusunan kembali kerangka mengenai konsep pendidikan kewarganegaraan yang sesuai dengan keinginan pendiri, sebuah negara demokrasi yang tidak paralel dengan dunia lain. Kemp memaparkan bahwa demokrasi Australia berpijak pada tradisi Inggris Raya dan Eropa serta seragam dengan nilai kewarganegaraan mereka (Kemp, 1994: 12). Pandangan Kemp

ini lalu dirujuk oleh Perdana Menteri John Howard yang lebih condong pada bentuk pemerintahan monarki konstitusional sebagaimana yang dianut oleh Kerajaan Inggris dan bukan pada bentuk pemerintahan republik. Ketika Pemerintahan Paul Keating menjabat, terjadi tuntutan yang mendorong perubahan bentuk Negara Australia menjadi bentuk Negara Republik.

Gelombang ini cukup besar sehingga sempat dilaksanakan referendum. Walaupun rakyat bersemangat untuk mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi dan mulai terbuka akan perubahan paradigma global, namun perubahan bentuk konstitusi negara merupakan soal lain. Akibatnya, setelah melalui beberapa tahap kampanye, Partai Republik lalu kehilangan banyak sekali dukungan terutama ketika mulai mengkampanyekan gagasan mengenai perubahan konstitusi dasar negara. Hal ini tentunya menimbulkan kekecewaan dari berbagai kalangan karena selisih suara antara partai yang pro republik dan partai pro monarki konstitusional tidak begitu signifikan. Sejak saat itu, pemerintahan Australia lalu kembali pada sistem monarki konstitusional dengan Ratu Elizabeth II sebagai puncak kepemimpinannya. Partai Konservatif telah menang dan pendapat Keating telah dikalahkan. Australia lalu kembali pada visi masa lalu (Kennedy, 2008: 184).

Kejadian Serangan di *Gedung World Trade Center* pada bulan September 2011 dan Bom Bali Oktober 2002, lalu turut andil dalam mempengaruhi situasi perpolitikan di Australia. Pemerintahan Australia kemudian bereaksi dengan memperkuat hubungan multilateral dan unilateral dalam rangka memerangi terorisme. Demokrasi semakin terjepit. Sejak saat itu, banyak sekali kebijakan pemerintah terkait dengan politik yang mencederai demokrasi hanya karena alasan perang melawan terorisme. Musuh demokrasi bukan hanya isu terorisme, tetapi juga kebijakan internal negara yang diambil pemerintah dalam rangka memberikan respon terhadap terorisme. Pemerintahan Howard lalu menyatakan perang terhadap terorisme dan sebagai imbasnya, beberapa hak warga Negara lalu dibatasi (Hocking, 2003; 2004). Hal ini menimbulkan reaksi yang sangat keras dari media. Kebijakan Pemerintah Australia pada saat itu lalu menjadi

antiliberal. Hak hukum khusus bagi kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur misalnya pada saat itu tidak lagi diberlakukan (Hocking, 2004: 91-93). Fase anti-liberal ini tetap mewarnai kebijakan politik Australia sampai akhir tahun 2007 ketika pemerintahan baru terpilih.

## PENUTUP

Pendidikan Kewarganegaraan di era global harus mampu membantu siswa untuk mengembangkan identitas dan keterikatan mereka sebagai masyarakat global yang terkoneksi dengan seluruh orang di berbagai belahan dunia. Identitas global kini merupakan kosmopolitanisme (Nussbaum, 2002). Sekolah harus membantu siswa untuk memahami bagaimana budaya, identifikasi nasional, regional, dan global yang saling terkait, kompleks, dan berkembang (Banks, 2004: 3-15). Sekolah juga diharapkan dapat membantu siswa untuk menyadari bahwa sebagai warga negara dari komunitas global, siswa wajib mengembangkan pemahaman dan kebutuhan untuk mengambil tindakan atau membuat keputusan untuk membantu memecahkan masalah dunia yang sulit. Keanekaragaman (*diversity*) menyajikan tantangan bagi pendidikan kewarganegaraan di seluruh dunia. Untuk secara efektif mempersiapkan siswa untuk menjadi reflektif, konstruktif, dan kontribusi lokal, nasional, dan warga global, sekolah harus serius mengatasi keragaman. Mengacu pada konsep demokrasi dan keberagaman yang dikembangkan Banks (2005) maka prinsip yang seharusnya ditanamkan melalui CCE yaitu:

Siswa harus belajar tentang hubungan yang kompleks antara kesatuan dan keragaman dalam komunitas lokal mereka, bangsa, dan dunia. Pendidikan kewargaan seharusnya mampu membantu siswa untuk memahami konsep keragaman secara internal maupun komparatif melalui contoh praktis yang diberikan oleh guru. Guru diharapkan mampu menyajikan isu-isu dan pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya dengan masyarakat multikultur seperti isu rasial, kelas, etnis, perbedaan agama, gender, dan keragaman bahasa. Siswa harus mengetahui:

a) bagaimana Negara menyikapi ketidakadilan diantara perbedaan status sosial masyarakat, b) bagaimana negara menyikapi keterbatasan dan kelemahan dalam konsep “bersatu dalam perbedaan”, c) bagaimana negara mendefinisikan konsep kewarganegaraan dan apa yang seharusnya dilakukan oleh siswa sebagai warga negara Indonesia, d) bagaimana anggota masyarakat yang memiliki kewarganegaraan berbeda harus bersikap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Siswa harus belajar tentang cara-cara di mana orang dalam komunitas mereka, bangsa, dan daerah semakin saling tergantung dengan orang lain di seluruh dunia dan terhubung ke ekonomi, politik, budaya, perubahan lingkungan, dan teknologi. Isu-isu seperti perdagangan bebas, kemajuan ilmu dan teknologi, penggunaan lahan, polusi, pemanasan global, keterbatasan sumber daya alam suatu negara telah mendorong suatu bangsa untuk memperkuat hubungan dengan negara lain. Siswa harus dikenalkan dengan perkembangan dunia di era global, bagaimana warga Negara seharusnya bersikap dalam percaturan ekonomi, politik, budaya, dan teknologi yang terjadi di seluruh dunia.

## REFERENSI

- ACARA. (2010). *Australian curriculum: history*. Sydney: Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority.
- \_\_\_\_\_. (2011). *National assessment program: civics and citizenship years 6 and 10 report 2010*. Sydney: Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority.
- \_\_\_\_\_. (2011). *The shape of the Australian curriculum v.3.0*. Sydney: Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority
- \_\_\_\_\_. (2012). *The shape of the Australian curriculum: civics and citizenship*. Sydney: Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Draft years 3–10 Australian curriculum: civics and citizenship*. Sydney: Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority.
- \_\_\_\_\_. (2014). *Australian curriculum: humanities and social sciences planning options 2014–2015*. Sydney: Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority.
- \_\_\_\_\_. (2016). *Changes to the f-10 Australian curriculum*. Sydney: Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority.
- \_\_\_\_\_. (2016). *The Australian curriculum, curriculum version 8.2*. Sydney: Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority.
- Australian Government Department of Education. (2014). *Review of the Australian curriculum*. Canberra:

Australian Government Department of Education  
Civics Expert Group.

Banks, J. A. (2004). Introduction: democratic citizenship education in multicultural societies. In J. A Banks (Ed.) *Diversity and citizenship education: Global Perspectives*. San Fransisco: Jossey-Bass

Banks, J. A. et. al. (2005). *Democracy and diversity: principles and conceps for educating citizens in a global age*. Seattle: University of Washington

Civics Expert Group. (1994). *Whereas the people: civics and citizenship education*. Canberra: Australian Government Publishing Service.

Department of Education, Science and Training. (2003a). *Evaluation of the discovering democracy programme 2000-2003*. Canberra: Commonwealth of Australia.

Department of Education, Science and Training. (2003b). *Values education study: Executive summary final report*. Canberra: Commonwealth of Australia.

Department of Immigration and Citizenship. (2007). *Life in Australia*. Canberra: Commonwealth of Australia.

Dickson, J. S. (1998). *How and why has civics education developed to its current situation?* Diambil pada tanggal 14 Juni 2016, from <http://www.abc.net.au/civics/teach/articles/jdickson/currentsit.htm>

Eddington, Donald & Ambrose, Kurt (2010). *Civics & citizenship education*. Australia: Department of Education, Employment and Workplace Relation

Gill, J., & Reid. A. (1999). *Civics education: the state of play or the play of the state. Curriculum perspectives*, 19(3), 31-40

- Hirst, John. (1999). *Discovering democracy, a guide to government and law in Australia*. Melbourne: Commonwealth of Australia
- Hocking, J. (2003). *Counter-terrorism and the criminalisation of politics: Australia's new security powers of detention, proscription and control*. *Australian Journal of Politics and History*, 49(3), pp.355-371.
- Hocking, J. (2004). *National security and democratic rights: Australian terror laws*. *The Sydney Papers*, 16(1), pp.89-95.
- Howard, Cosmo & Patten, Steve. (2006). *Valuing civics: political commitment and the new citizenship education in Australia*. Canada: *Canadian Journal of Education* p. 454-475.

---

# DIMENSI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDIA

**Zaid Bin Ahmad**  
**zaid.bin.ahmad11@gmail.com**

---

## PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan dimensi bagi seorang individu untuk belajar bagaimana kehidupan di ruang publik, menjadi warga negara yang baik dan berpartisipasi sebagai warga negara. Dalam mencapai tujuan PKn tersebut, banyak materi-materi penting terkait PKn yang perlu diajarkan kepada generasi muda. Karena tantangan yang dihadapi di era global ini seringkali bernuansa toleransi, multikulturalisme, etnosentrisme, keadilan sosial, hak dan kewajiban warga negara, identitas nasional dan Hak Asasi Manusia. Sebab itu, PKn harusnya mampu menjawab tantangan tersebut dengan memberikan pemahaman kepada generasi muda. Salah satu wujud dari pendidikan kewarganegaraan adalah dengan pendidikan multikultural. Pemahaman pendidikan multikultural bagi guru dan siswa akan sangat penting demi terciptanya suasana yang harmoni di kalangan generasi muda.

Pendidikan multikultural bagi siswa seharusnya dapat menjadi dasar terciptanya integrasi nilai-nilai budaya sehingga perbedaan tidak menimbulkan benturan. Dalam konsep pendidikan multikultural yang direkomendasikan UNESCO, Oktober 1994 di Jenewa, seharusnya pendidikan multikultural itu : (a) pendidikan seyogyanya mengembangkan kesadaran untuk memahami dan menerima sistem nilai dalam kebhinekaan pribadi, jenis kelamin, ras, etnik dan kultur; (b) pendidikan seyogyanya mendorong konvergensi gagasan yang memperkokoh

perdamaian, persaudaraan, dan solidaritas dalam masyarakat; (c) pendidikan seyogyanya membangun kesadaran untuk menyelesaikan konflik secara damai; dan (d) pendidikan seyogyanya meningkatkan pengembangan kualitas toleransi dan kemauan untuk berbagi secara mendalam. Dari rekomendasi UNESCO tersebut dapat terlihat bahwa seharusnya negara-negara di belahan dunia ini menerapkan pendidikan multikultural dalam dalam kurikulum pendidikan nasionalnya. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat di berbagai negara yang sangat multiluktural, seperti negara Malaysia, Singapura, Indonesia, dan India.

Di India, pendidikan multikultural adalah hal yang sangat urgen. Hal tersebut terlihat dari banyaknya komunitas religius (agama), bahasa, etnisitas, kasta, dan populasi minoritas. Untuk mencegah terjadinya benturan antar komunitas dalam masyarakat, pemerintah India mempunyai cara dalam membelajarkan pendidikan multikultural kepada generasi mudanya, istilah ini dikenal dengan “kesatuan dalam keragaman” (Bikku Parekh, 2000). Sehingga untuk mencapai masa depan yang harmoni di India, pembinaan nilai multikulturalisme pada peserta didik sudah menjadi bagian kurikulum sekolah. Namun kapan nilai-nilai multikultural ini dimasukkan ke dalam materi pembelajaran? Bagaimana hal tersebut dibelajarkan? Dan seperti apa guru dan siswa mempraktekkan pendidikan multikultural? Hal tersebut akan dibahas dalam pembahasan berikutnya.

## PEMBAHASAN

### A. Kondisi Multikultural di India

India adalah negara yang kaya akan budaya, bahasa, agama, dan etnis. India adalah salah satu negara dengan penduduk yang paling beragam di dunia. Sesuai Sensus 1961, di India terdapat 1.652 bahasa ibu. Budaya India telah dibentuk oleh sejarah panjang, geografi unik dan beragam demografi. Sistem kasta India menggambarkan stratifikasi sosial dan

pembatasan sosial dalam masyarakatnya, di mana kelas sosial didefinisikan oleh ribuan kelompok hereditas endogamous, sering disebut sebagai Jatis atau kasta. Di samping itu, agama di India juga sangat beragam. Berbagai agama dan kepercayaan menjadi warna tersendiri dalam beragamnya masyarakat di India.

Agama Hindu adalah agama mayoritas di India, diikuti oleh umat Islam. Statistik menunjukkan bahwa persentase Hindu (80,5 %), Muslim (13,4 %), Kristen (2,3 %), Sikh (2,1 %), Budha, Baha'i, Jain dan Yahudi adalah selebihnya. Di samping itu, dari segi bahasa, India mengikuti kebijakan tiga bahasa. Hindi (diucapkan dalam bentuk Hindustan) adalah bahasa federal yang resmi, bahasa Inggris memiliki status asosiasi federal. Kemudian bahasa ketiga adalah bahasa budaya dan daerah masing-masing (dalam *sprachraum* Hindi, ini untuk mengurangi bilingualisme). Republik India sebagian besar diambil berdasarkan kelompok linguistik, keputusan ini menyebabkan pelestarian dan kelanjutan dari sub-budaya etno-linguistik lokal, kecuali untuk *sprachraum* Hindi yang sendiri terbagi menjadi banyak negara. Dengan demikian, sebagian besar penduduk negara India berbeda satu sama lain dalam bahasa, budaya, masakan, pakaian, gaya sastra, arsitektur, musik dan perayaan.

## **B. Pendidikan Multikultural Untuk Calon Guru Antar Budaya di India**

Guru merupakan faktor penting dalam menanamkan nilai-nilai penting dalam pendidikan. Dalam membelajarkan pendidikan multikultural kepada siswa, seorang guru hendaknya cakap dalam pembelajaran multikultural tersebut. Guru telah menjadi bagian penting dalam membina karakter generasi muda di India. Setelah bangkit dari masa penjajahan, guru-guru di India menjadi motor dalam memberikan pemahaman konsep kewarganegaraan dan dalam perkembangan pendidikan. Sebagai salah satu kekuatan sosial dalam membentuk warga negara berpendidikan, guru-guru di India telah dibina oleh pemerintah, baik guru-guru dari pedesaan maupun yang di perkotaan agar

lebihn matang dalam menanamkan pendidikan kepada generasi muda di sekolah-sekolah India.

Di India, guru-guru yang mengajarkan pendidikan multikultural kepada siswa disekolah dikenal dengan guru antar budaya. Secara khusus, guru antar budaya ini mempunyai kemampuan dan pelatihan kependidikan tersendiri yang nantinya akan digunakan menghadapi siswa-siswi dari berbagai budaya disekolah. Singkatnya, para guru yang akan menyandang gelar guru antar budaya harus menguasai:

- a. Semangat dan bergairah untuk bertemu orang lain terutama orang baru.  
Artinya adalah guru dibentuk menjadi pendidik yang selalu siap untuk bertemu dengan orang baru, baik yang satu budaya denganya terlebih dengan yang berbeda budaya dengannya.
- b. Kemampuan untuk berinteraksi dengan budaya lain.  
Hal ini sangat penting bagi guru antar budaya di India, karena guru dituntut bisa mengajarkan identitas budaya siswanya dan budaya nasional bangsanya.
- c. Berpandangan terbuka.  
Artinya tidak menutup diri dari perkembangan dunia termasuk dengan bisa mengantisipasi ancaman terhadap nilai-nilai budaya-budaya di India.
- d. Mampu melangkah keluar dari diri sendiri.  
Artinya, guru harus mampu melihat permasalahan yang ada dari luar konteks budayanya sendiri dan mampu melihat dari sudut pandang posisi budaya lain.
- e. Mampu berikap toleransi.  
Artinya, guru antar budaya di India harus mampu menghargai, menghormati dan memahami budaya lain sebagaimana ia menghargai budayanya sendiri.
- f. Kemampuan untuk menjadi realis dan optimis pada saat bersamaan.

Artinya, dalam membelajarkan nilai-nilai kebudayaan, dalam membelajarkan menghormati budaya lain kepada siswa, guru antar budaya harus mampu memosisikan realitas dalam kebudayaan sebagai suatu yang niscaya dan mengajarkan bahwa meskipun berbeda tetap bisa hidup bersama.

- g. Pemahaman tentang nilai orang lain dan nilai budaya lain.  
Artinya, guru antar budaya harus benar-benar memahami nilai-nilai budaya dari siswa-siswanya, sehingga dalam membelajarkan penghargaan terhadap antar budaya jadi lebih mudah.
- h. Kesabaran dalam mengajar siswa.  
Hal lain yang tidak kalah penting adalah kesabaran guru antar budaya, karena memberikan pemahaman multikulturalisme kepada siswa sangat rumit dan tidak gampang membelajarkan ilmu-ilmu alam.
- i. Fleksibilitas.  
Artinya guru antar budaya adalah guru yang siap dalam situasi dan kondisi apapun terkait dalam membejarkan multikulturalisme kepada siswanya.

Dari pemaparan tersebut terlihat bahwa di India, untuk menjadi seorang guru antar budaya, dalam hal ini adalah guru pendidikan multikultural tidak mudah, banyak hal yang harus dipelajari oleh calon guru dan banyak hal yang menjadi pengetahuan dan pengalaman agar siap menjadi guru antar budaya. Disamping itu, penguasaan bahasa dan keterampilan berkomunikasi bagi guru antar budaya sangatlah penting karena beragamnya bahasa di India.

Keterampilan komunikasi sangat penting dalam pengajaran lintas budaya karena hal tersebut akan melancarkan guru antar budaya dalam membelajarkan pendidikan multikulturalisme kepada siswa. Selain itu, perbedaan gaya komunikasi yang ada pada guru akan sangat membantu dalam

diskusi tentang komunikasi antarbudaya dengan para siswanya. Oleh karena itu guru sangat perlu untuk memahami, mengakui dan mengenali perbedaan dalam gaya komunikasi. Seringkali para siswa akan mengamati permasalahan yang ada dengan gaya komunikasi yang mereka punya. Berbicara di kelas, mengemukakan opini, bernegosiasi dengan teman, berdiskusi dalam kelompok terkadang siswa menggunakan bahasa masing-masing. Sehingga hal tersebut bisa menimbulkan kebingungan pada guru apabila ia tidak menguasai keterampilan dalam berkomunikasi. Nuansa budaya dalam komunikasi ini perlu dilakukan identifikasi, diamati lagi, didiskusikan dan disosialisasikan untuk guru. Mengingat kesadaran akan gaya komunikasi yang berbeda merupakan atribut penting bagi guru antar budaya.

### C. Pendidikan Multikultural Untuk Generasi Muda di India

Objek utama dari pendidikan multikultural atau pendidikan antar budaya di India adalah generasi mudanya. Setelah guru antar budaya dibentuk dan dilatih untuk menjadi guru yang handal, maka tugas guru antar budaya selanjutnya adalah membeajarkan pendidikan multikultural kepada para siswanya. Di India, para guru menggunakan banyak metode dalam mengenalkan keragaman budaya di India dan membelajarkan multikultural kepada siswanya. Salah satu pendekatan yang dilakukan guru adalah dengan pendidikan sastra. Sastra sudah lama dianggap bagian penting di India. Meskipun penggunaan cara ini di dalam pendidikan masih dianggap sebagai bentuk tradisional.

Di India, transmisi budaya, norma sosial dan moral biasanya disampaikan melalui pendidikan sastra. *Ramayana* dan *Mahabharata*, misalnya, disebut sebagai "Cerita nenek" dan terpampang rapi di benak anak dari generasi ke generasi. Kemudian *Panchatantra*, koleksi dari dongeng yang ditulis oleh Bishnu Sharma adalah cerita rakyat yang digunakan untuk mengajarkan praktek sosiologi dan pemerintahan. Meskipun belakangan ini, pendidikan bagi anak-anak tetap terikat dengan literatur pedagogik bahasa Inggris dalam

kurikulum sekolah. Kemudian dalam pendidikan universitas telah menyediakannya orientasi berbasis nilai ke akademik, sosial, dan estetika untuk mengajar. Selain itu, kursus sastra misalnya, diberikan secara langsung kepada peserta didik untuk memahami lingkungan hidupnya.

Dengan demikian, pendidikan sastra bagi peserta didik adalah salah satu jalan dan upaya oleh guru dalam membelajarkan pendidikan multikultural kepada siswa di India. Dalam pendidikan sastra yang diberikan guru antar budaya kepada siswa mempunyai beragam strategi, materi, tujuan dan bentuk pembelajaran, di antaranya adalah sebagai berikut :

### **1. Cerita Rakyat sebagai Bentuk Pendidikan Sastra yang Membelajarkan Multikulturalisme.**

Jika pembelajaran di kelas belum di mulai, kemudian diceritakan atau diperdengarkan tentang cerita rakyat terkait budaya kepada mereka, mungkin hal pertama yang dipahami siswa tersebut adalah apa yang kita pahami tentang makna cerita tersebut kepada mereka. Meski ada banyak cerita rakyat yang diajarkan disekolah, namun siswa harus diberikan dan menemukan cerita rakyat yang menarik bagi mereka. Nilai-nilai dari cerita rakyat termasuk nilai-nilai universalitas, keberanian, kejujuran, kepahlawanan, kesetiakawanan dan menghindari peperangan akan menjadi ketertarikan mereka untuk mempelajari berbagai aspek budaya yang berbeda. Hal tersebut akan lebih mudah membelajarkan kepada siswa apabila mereka mengerti dan menerima keberagaman budaya di antara mereka.

Memberikan peserta didik materi cerita rakyat adalah sebuah cara ideal untuk mendekati pengajaran pemahaman nilai budaya dan multikultural. Karena ketika siswa di masa remaja, mereka akan mempunyai keinginan untuk belajar menjadi bagian dari berbagai kelompok di sekolah. Dalam kelompok ini, masing-masing siswa sedang mencari identitas pribadinya dan pada saat itu, siswa harus diberikan panduan dan arah untuk menemukan jalan yang benar. Dengan memberikan cerita rakyat kepada siswa akan menawarkan kebebasan kepada peserta didik untuk menggunakan imajinasi mereka untuk mendapatkan

ilmudan pengalaman yang akan membantu mereka menangani berbagai situasi sosial dan multikultural yang akan datang dengan cara mereka sendiri. Kesempatan untuk belajar tentang budaya lain juga akan membantu mereka memudahkan dalam proses pembelajaran baik secara individu maupun kelompok. Yang pada akhirnya akan mengarahkan mereka untuk memenuhi peran sebagai warga negara yang toleran dan bertanggung jawab.

## **2. Nilai-nilai Cerita Rakyat untuk Menegakkan Multikulturalisme**

Dalam cerita rakyat yang diberikan guru antar budaya kepada siswa tentunya mempunyai nilai-nilai yang bisa menjadi acuan dalam membelajarkan pemahaman antar budaya, toleransi antar budaya dan penerimaan antar budaya serta hidup berdampingan dalam berbagai budaya yang merupakan perwujudan dari multikulturalisme. Oleh karena itu, unsur cerita rakyat yang di usung untuk bisa membantu peserta didik memahami nilai-nilai multikulturalisme, harus memenuhi nilai-nilai sebagai berikut:

- a. Pengembangan rasa demokratis kewarganegaraan dengan kemampuan untuk memahami konteks multicultural masyarakat.
- b. Pengembangan rasa hak asasi manusia dengan maksud membangun kerjasama antar budaya yang dapat menopang gagasan multikulturalisme
- c. Pengembangan nilai-nilai kemanusiaan seperti sebagai kebebasan, keadilan, dan persamaan yang penting untuk pengembangan perspektif multikultural.
- d. Penerimaan keanekaragaman budaya sebagai simbol rasa damai.
- e. Pengambilan keputusan, keterampilan berpikir kritis, dan penalaran moral, yang memungkinkan warga untuk membuat pilihan jelas dan rasional dalam kehidupan sehari-hari mereka.
- f. Pengembangan rasa pengakuan, penerimaan, apresiasi, dan mengakomodasi keragaman budaya/etnis.

- g. Pengurangan dan penghapusan budaya diskriminatif, diskriminasi rasial, konflik, prasangka, dan bias stereotip.
- h. Manajemen perdamaian, harmoni, dan hidup kooperatif.
- i. Pengembangan keterampilan dalam simpati dan empati.

Dengan penanaman nilai tersebut, cerita rakyat dapat menjadi dasar bagi integrasi sosial, psikologis, dan budaya multikulturalisme yang memungkinkan peserta didik terlibat dalam bidang berikut:

- a. Kesadaran berbudaya.  
Artinya, siswa yang telah memahami nilai-nilai cerita rakyat akan mempunyai sikap akan cinta budaya terhadap budayanya sendiri dan sadar akan menghargai budaya orang lain.
- b. Studi budaya.  
Artinya, siswa yang sudah memahami nilai-nilai dalam cerita rakyat diharapkan sudah mampu melakukan studi terhadap permasalahan budaya yang ada.
- c. Pemahaman dan pengurangan permasalahan budaya.  
Setelah melakukan studi terhadap budaya, siswa diharapkan mampu dalam kehidupannya menjadi orang yang bisa mengatasi permasalahan budaya dalam masyarakat.
- d. Komunikasi antarbudaya/dialog.  
Artinya, setelah mampu memahami budaya lain tentunya agar tidak terjadi permasalahan antar budaya maka siswa dapat melakukan komunikasi antar budaya dan kerjasama antar budaya.
- e. Perkembangankompetensi antar budaya.  
Dari kerjasama antar budaya yang dibangun oleh siswa seharusnya dapat menjadi ajang untuk memajukan budaya masing-masing untuk perkembangan budaya.

- f. Akulturasi.  
Yaitu ketika mereka dihadapkan pada budaya yang berbeda, mampu menerima keberadaan budaya tersebut tanpa merubah identitas budayanya sendiri.
- g. Penghapusan jarak sosial.  
Siswa mampu menjadi aktor penghapusan strata sosial dalam masyarakat yang menandang suatu golongan masyarakat lebih tinggi dari masyarakat lain.

Dari pemaparan tersebut terlihat bahwa siswa yang diajarkan nilai-nilai cerita rakyat akan mampu menjadi manusia yang kompeten dalam hal kebudayaan terutama dalam menegakkan multikultural dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Terutama siswa harus mampu menjawab permasalahan dalam hal penghapusan jarak sosial dalam masyarakat, karena di India masih terdapat kasta-kasta dalam beberapa budaya dan agama tertentu yang satu kasta lebih tinggi dari kasta yang lainnya.

### **3. Materi Cerita Rakyat Berbasis Tugas untuk Mengembangkan Sikap Multikulturalisme.**

Membelajarkan materi ajar cerita rakyat berbasis tugas adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan konsep multikulturalisme dengan menggunakan berbagai tugas interaktif yang terintegrasi. Di India, hal tersebut sangat cocok dibelajarkan kepada siswa untuk mengembangkan sikap multikulturalisme, karena : *Pertama*, tugas tersebut didesain untuk mengembangkan pemahaman terhadap nilai-nilai cerita rakyat yang secara metodis adalah cara untuk menjadikan pelajaran yang mudah dipelajari. *Kedua*, mengembangkan materi yang fokus pada pembelajaran berbasis tugas didukung dengan argumen bahwa pendekatan seperti ini akan memberikan tujuan untuk pembelajaran dan penggunaan konten, dan oleh karena itu lebih efektif secara pendidikan. Dengan menggunakan materi pembelajaran berbasis tugas, memungkinkan situasi kelas

yang berpusat pada peserta didik. **Ketiga**, pembelajaran berbasis tugas memudahkan peserta didik untuk terlibat dengan aspek kegiatan kognitif dan prosedur yang tepat. **Keempat**, metode ini mendorong sikap, nilai, dan keterampilan yang diperlukan dalam pembelajaran multikulturalisme dengan sangat bergantung pada keterlibatan peserta didik dan penekanan pada pengalaman yang dibawa peserta didik ke dalam kelas. Dengan pembelajaran berbasis tugas, fasilitator bisa memanfaatkan secara maksimal keterlibatan peserta didik sebagai cara untuk menilai proses belajar sebagai hasil dari belajar.

#### **4. Konsep yang diajarkan oleh guru antar budaya kepada siswa**

Dalam pembelajaran multikultural berbasis cerita rakyat, konsep-konsep yang perlu ditanamkan kepada peserta didik adalah :

- a. Bahwa ada perbedaan bahasa, budaya, adat dan agama. Itu adalah Karakteristik fisik fenomena alami dari umat manusia dan merupakan fakta dunia.
- b. Cara menghormati bahasa lain, budaya, adat istiadat, dan karakter fisik budaya lain.
- c. Bagaimana memahami bahwa orang asing dan imigran mungkin menghadapi masalah saat di luar negeri.
- d. Pengetahuan bahwa pribumi diharapkan bisa memahaminya dan membantu saat dibutuhkan oleh masyarakatnya ketika menghadapi masalah budaya.
- e. Bagaimana untuk menunjukkan simpatik, dan empati, dan moralistik terhadap orang asing dan imigran.
- f. Bagaimana mengembangkan sikap, nilai, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, termasuk keterampilan untuk memahami dan bereaksi terhadap insiden kritis.

## 5. Tujuan yang diharapkan dalam pendidikan multikultural di India

Dalam pembelajaran multikultural berbasis cerita rakyat, tujuan yang diharapkan adalah siswa akan dapat:

- a. Mengidentifikasi dan mengenali perbedaan dan kesamaan budaya.
- b. Memahami bahwa setiap kebudayaan adalah unik.
- c. Tidak membandingkan budaya yang berbeda.
- d. Memahami bahwa cara hidup budaya lain juga harus dihargai dan dihormati.
- e. Mengembangkan berpikir kritis dan pemikiran abstrak
- f. Berperilaku empati terhadap orang asing.
- g. Mengembangkan pemahaman global yang lebih dalam dan penghargaan atas perbedaan budaya sebagai siswa yang belajar cerita dari dunia sekitar.
- h. Memahami nilai menjadi manusia yang simpati, pengertian, dan penolong.
- i. Memahami semangat kewarganegaraan.

## PENUTUP

Pendidikan multikultural berbasis cerita rakyat disintesis dengan belajar berbasis tugas di India telah dirancang untuk bisa mencapai tujuan dan mengorientasikan pelajar muda terhadap konsep keragaman budaya dan multikulturalisme. Berbagai tugas menimbulkan kesadaran akan pola budaya yang berbeda dan dengan begitu pembelajaran mampu mengembangkan pengakuan dan menghormati beragam budaya dan nilai budaya multikulturalisme. Jenis pelajaran berbasis tugas menggunakan literatur cerita rakyat bisa jadi praktik yang menjanjikan dengan manfaat di seluruh dunia karena pendidikan multikultural merupakan konsep yang sangat penting dan perlu. Literatur cerita rakyat mengidentifikasi tiga bentuk pedagogi multikultural: konservatif, liberal, dan kritis. Konservatif melihat pendidikan multikultural sebagai sarana mengintegrasikan siswa menjadi masyarakat yang lebih luas. Liberal berusaha untuk

mengakui keragaman, tapi tidak menantang tatanan sosial yang mendasarinya. Sedangkan Multikulturalisme kritis melihat pendidikan sebagai cara mengatasi kesenjangan social dibentuk oleh perbedaan ras, etnis, dan kelas sosial.

Guru perlu memahami multikulturalisme dalam rangka memberikan pendidikan yang sama bagi semua siswa. Pengalaman guru menunjukkan bahwa banyak guru merasa mereka membutuhkan lebih banyak pelatihan dalam pendidikan multicultural karena keragaman kelas mereka. Namun, mereka tampaknya tidak terlalu paham tentang nilai-nilai tertentu dalam pendidikan multikultural dan tidak yakin bagaimana menerapkan prinsip-prinsip pendidikan multikultural secara efektif. Meninjau persepsi guru dalam kesiapan profesional mereka untuk mengajar budaya yang beragam siswa akan membantu program pendidikan guru mempersiapkan guru siswa untuk bekerja lebih efektif dengan beragam budaya siswa. Mereka yang membuat program pelatihan guru harus merenungkan cara-cara untuk mengintegrasikan keanekaragaman di program pelatihan guru antar budaya, memberikan kursus dan pelatihan termasuk memberikan peluang untuk membantu para guru menerapkan strategi inovatif yang berguna bagi guru dalam menghadapi siswa di kelas.

Dari apa yang di bahas dalam tulisan ini dapat kita melihat bagaimana pendidikan multikultural diimplementasikan dalam praktek, baik di tingkat sekolah dan pelatihan guru antar budaya. Berkembangnya dengan baik pendidikan multikultural, terutama pelatihan guru antar budaya, sangat penting untuk membentuk kesadaran guru, kesiapan mental, dan sikap tentang pendidikan multikultural dan mereka akan bisa mengajar siswa secara efektif. Oleh karena itu diperlukan secara sengaja dan terprogram untuk merencanakan dan mendukung proses ini sehingga guru siap baik secara pribadi dan profesional untuk bekerja dengan siswa dari latar belakang budaya dan ras yang berbeda. Pelatihan yang diberikan kepada guru akan menyediakan guru model untuk berpikir dan berdiskusi tentang keragaman budaya. Dengan memiliki keterampilan dan

pengetahuan dalam pedagogi multikultural, guru baru akan diberdayakan untuk bekerja menciptakan struktur dan pengaturan sosial dalam lingkungan sekolah yang mempromosikan kesetaraan di sekolah dan dalam masyarakat.

## REFERENSI

- Ahmed Alismail, Halah (2016). *Multicultural Education: Teachers' Perceptions and Preparation. Journal of Education and Practice*. Vol.7. No.11. Department Curriculum and Instruction, School of Education, University of Minnesota : India.
- Johnson, R. (2009). *Developing intercultural teachers: The Mumbai global experience project*. Refereed paper presented at 'Teacher education crossing borders: Cultures, contexts, communities and curriculum' the annual conference of the Australian Teacher Education Association (ATEA), Albury, 28 June – 1 July.
- Mehta Venu (2013). *Literature-Oriented Multicultural Education In India Children's Experiences With A Task-Based Folklore Lesson*. Journal Multicultural Education. Vol 1. No. 1. Department Of Communications Skills. Charotar University Of Science and Technology Caddo Gap Press. Gujarat : India.



---

# PENDIDIKAN PRAKTIS DAN TERINTEGRASI: PEMBENTUKAN KARAKTER MELALUI CIVIC EDUCATION DI JEPANG

Monica Tiara  
monicatiara27@gmail.com

---

## PENDAHULUAN

**K**arakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Secara psikologis dan socio-cultural, pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Istilah karakter juga dihubungkan dan dipertukarkan dengan istilah etika, akhlak, dan atau nilai dan berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi "positif" bukan netral.

Davis, dkk (2010) menjelaskan bahwa pendidikan di Jepang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian setiap orang. Pendidikan di Jepang diarahkan agar setiap orang mampu saling mencintai dan menjaga hubungan dengan orang lain. Hal ini berarti pendidikan mengarahkan setiap orang untuk mencintai kebenaran, berlaku adil, menghargai nilai-nilai yang dibawa setiap orang, bertanggungjawab dan mandiri untuk membangun negara yang adil.

Membawa misi pendidikan untuk membentuk kesempurnaan individu. Jepang mengembangkan penanaman nilai dan pembentukan karakter melalui civic education. Oleh karena itu, civic education di Jepang cenderung berorientasi pada pengembangan pengetahuan dan kemampuan tiap orang melalui pengalaman langsung dalam upaya membangun bangsa Jepang (Ker: 1999). Jelaslah bahwa civic education juga mengemban tanggungjawab membentuk moral yang baik setiap orang. Tanggung jawab ditekankan pada struktur pendidikan untuk pembentukan sikap disiplin, malu dan bekerjasama untuk membangun dan mengembangkan masyarakat. Aspek moral kewarganegaraan yang dimaksudkan sebagai konsep pembentuk warganegara yang baik "good citizen". Maka dari itu, pembahasan ini menekankan pada "*Pembentukan Karakter Melalui Civic Education di Jepang*".

## PEMBAHASAN

### A. Tatanan Civic Education di Jepang

Pendidikan menjadi pusat perhatian pemerintah sebagaimana direncanakan sejak periode Meiji (abad ke-19) (Otsu, 1998:51; Ikeno, 2005:93). Periode setelah kekalahan Jepang ini, merupakan titik balik yang sangat penting bagi pendidikan di Jepang. Pendidikan Jepang mengubah orientasinya dari yang bersifat militer ke arah pendekatan yang lebih demokratis. Demikian pula perubahan dirasakan dalam Pendidikan Kewarganegaraan, mata pelajaran ini telah bergeser penekanannya dari pendidikan untuk para warganegara dan pengajaran disiplin ilmu-ilmu sosial yang terkait dengan upaya untuk membangun bangsa Jepang, ke arah Pendidikan Kewarganegaraan untuk semua warganegara (Ikeno, 2005:93).

Pendidikan Kewarganegaraan Jepang setelah Perang Dunia II dapat digambarkan dalam tiga periode (Ikeno, 2005:93) sebagai berikut: "*Pertama*, periode tahun 1947-1955, berorientasi pada pengalaman. *Kedua*, periode tahun 1955-1985, berorientasi pada pengetahuan, dan *ketiga*, periode tahun 1985-sekarang, berorientasi pada kemampuan". Oleh karena itu,

landasan Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Jepang tidak dapat dilepaskan dari konsep warganegara (*komin, citizen*) dan kewarganegaraan (*citizenship*).

## B. Pendidikan Karakter di Jepang

Pendidikan moral atau karakter di Jepang diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam mata pelajaran lainnya. Kurikulum pendidikan di Jepang terdiri atas tiga kategori: (1) mata pelajaran akademik (wajib dan pilihan), (2) pendidikan moral, dan (3) kegiatan khusus. Pendidikan moral diberikan sebanyak 34 jam belajar pada tingkat awal. Kandungan pendidikan moral dibedakan menjadi empat area dengan total 76 item. Keempat area tersebut adalah:

1. Regarding Self, meliputi : Moderation (pengerjaan mandiri dan melakukan “moderator life”), Diligence (bekerja keras secara mandiri) c. Courage (pengejaan sesuatu secara benar dengan keberanian), Sincerity (bekerja dengan sincerity and cheer), Freedom and Order (nilai kebebasan dan kedisiplinan), Self-improvement (pemahaman terhadap diri sendiri, mengubah apa yang seharusnya diubah, dan memperbaiki diri sendiri), Love for Truth (mencintai dan mencari kebenaran, mencari dasar kehidupan dan bertujuan mencapai standar ideal). (Murni Ramli. 2009)
2. Relation to Others, meliputi: Courtesy (pemahaman terhadap tata sopan santun, berbicara dan bertingkah laku tergantung pada situasi dan kondisi) , Consideration and Kindness (memperhatikan kepentingan orang lain, baik hati, dan empati), Friendship (memahami, percaya dan menolong orang lain), Thanks and Respect (menghargai dan menghormati orang-orang yang telah berjasa kepada kita, salah satunya dengan memberikan ucapan terima kasih), Modesty (menghargai orang lain

yang berbeda ide dan status melalui sudut pandang luas)  
(Murni Ramli. 2009)

3. Relation to the nature and the sublim with: Respect for Nature (mengenal alam dan cinta kepada hewan dan tanaman), Respect for Life (menghargai kehidupan dan makhluk hidup), Aesthetic Sensitivity (memiliki sensitivitas estetika dan perasaan terhadap kehidupan manusia), Nobility (mempercayai kekuatan dan keunggulan manusia untuk mengatasi kelemahan diri, dan menemukan kebahagiaan sebagai manusia) (Murni Ramli. 2009).
4. Relation to Group and Society, meliputi: a. Public Duty (menjaga janji dan menjalankan kewajiban dalam masyarakat, serta merasa kewajiban publik) b. Justice (jujur dan tak berpihak tanpa diskriminasi, prejudice dan keadilan) c. Group Participation and Responsibility (keinginan untuk berpartisipasi sebagai grup, menyadari perannya, melaksanakan tugas dan kewajiban dengan bekerja sama) d. Industry (memahami makna bekerja keras, dan keinginan untuk bekerja) e. Respect for Family Members (mencintai dan menghormati guru dan orang di sekolah/kampus, menciptakan tradisi sekolah yang lebih baik (kerja sama) ) f. Contribution to Society (menyadari kedudukannya dalam masyarakat setempat, hormat dan cinta terhadap mereka yang berkontribusi dalam masyarakat (senior citizens) ) g. Respect for Tradition and Love of Nation (tertarik kepada budaya dan tradisi bangsa, mencintai bangsa) h. Respect for Other Culture (menghargai budaya asing dan manusianya, dengan menyadari kesadaran sebagai bangsa, dan menjalani persahabatan internasional. (Murni Ramli. 2009)

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pendidikan moral yang diterapkan di Jepang sangatlah rinci yang pada akhirnya dapat membentuk karakter orang Jepang yang khas. Pada dasarnya yang paling menentukan keberhasilan

pembentukan karakter masyarakat Jepang dalam lembaga pendidikan formal ada pada implementasinya dalam kehidupan nyata para siswa.

### **C. Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Praktis dan Terintegrasi Melalui Civic Education.**

Berdasarkan struktur budaya, masyarakat Jepang terkenal dengan masyarakat yang rapi, tertib dan disiplin. Tidak hanya orang dewasa, anak kecilpun mau bersabar untuk mengantre masuk ke kereta. Bagaimana kedisiplinan itu dibangun? Norma dalam masyarakat Jepang sangat terkait dengan ajaran Shinto dan Budha, tetapi menariknya kedua agama ini tidak diajarkan di sekolah dalam bentuk pelajaran wajib. Akan tetapi, nilai nilai agama itu diwujudkan dalam kehidupan sehari hari di sekolah.

Dalam bahasa Jepang, pendidikan moral disebut "doutokukyouiku". *Doutoku* berarti moral dan *kyouiku* berarti pendidikan. Pendidikan moral di sekolah sekolah SD dan SMP di Jepang tidak diajarkan sebagai sebuah mata pelajaran khusus, tetapi diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Termasuk dalam mata pelajaran civic education.

Pendidikan moral di Jepang diantaranya diajarkan dalam pelajaran "*seikatsuka*" atau *life skills* atau pendidikan kehidupan sehari hari. Pada pelajaran tersebut siswa SD diajari tata cara menyeberang jalan, adab di dalam kereta, yang tidak saja berupa teori, tetapi guru juga mengajak mereka untuk bersama naik kereta dan mempraktikkannya. Pembentukan karakter pada tingkat SD dan SMP di Jepang, terintegrasi dalam mata pelajaran. Pembelajaran dilakukan dengan menyatukan kesemua konsep dasar ilmu dengan sikap untuk menciptakan pemahaman yang mendalam.

Ramli (2008) menjelaskan bahwa pembentukan karakter di Jepang dilakukan melalui penanaman nilai secara praktis dan terintegrasi melalui mata pelajaran khususnya civic education." Pendidikan karakter di Negara Jepang tidak hanya dilakukan di

sekolah -sekolah tetapi juga di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hampir di setiap sudut Jepang, mudah ditemui himbauan ataupun poster-poster di yang memberikan pesan agar seluruh masyarakat bersikap sopan, saling menghargai, disiplin dan sebagainya. Tidak hanya poster, kendaraan umum di Jepang sangat terkenal dengan sarat peringatan dan ajakan untuk mematuhi norma-norma, misalnya larangan untuk menelepon, berbicara keras, dan beberapa tindakan yang mengganggu. Acara di TV swasta sekalipun, selalu berisikan program-program yang sarat nilai pendidikan, di samping tidak melupakan unsur hiburan (Ramli, 2008). Berbeda di sekolah dasar dan menengah pertama, pendidikan moral di SMA selanjutnya menjadi civic education. Pembekalan prinsip dasar hidup yang kuat di masa pendidikan dasar inilah yang membuat kedisiplinan dan keteraturan dalam masyarakat Jepang (Ramli, 2008).

Pendidikan moral di Jepang tidak hanya diajarkan teorinya saja, tetapi Jepang lebih mengutamakan realisasi dari pengajaran moral tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter di sekolah-sekolah Jepang banyak diajarkan dalam bentuk praktek langsung. Pendidikan moral di sekolah-sekolah SD dan SMP di Jepang tidak diajarkan sebagai sebuah mata pelajaran khusus, tetapi diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Yang bertanggung jawab secara langsung adalah wali kelas. Pendidikan moral di Jepang diantaranya diajarkan dalam pelajaran *seikatsu* atau *life skill* atau pendidikan kehidupan sehari-hari. Dalam pelajaran itu siswa SD diajari tatacara menyebrang jalan, adab di dalam kereta, yang tidak saja berupa teori, tetapi guru juga mengajak mereka untuk bersama naik kereta dan memarktekannya. Wali kelas juga menyampaikan kasus pelanggaran dan mengajak siswa untuk mendiskusikan pemecahannya (Murni Ramli 2008).

Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan moral di SD Jepang lebih mengutamakan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Ramli dalam makalahnya yang berjudul Pendidikan Moral di Jepang menjelaskan, anak-anak kelas 1 SD hanya diajari perilaku sehari-hari yang ditemukan dilingkungannya, misalnya jika mereka sedang bermain, tiba-tiba tanpa sengaja memecahkan kaca jendela tetangga, apa yang harus mereka

lakukan? Anak-anak diajarkan untuk segera minta maaf dan tidak boleh lari dari tanggung jawab. (Murni Ramli. 2006).

## PENUTUP

Pendidikan moral di Jepang disebut "doutokukyouiku". *Doutoku* berarti moral dan *kyouiku* berarti pendidikan. Pendidikan moral di sekolah SD dan SMP di Jepang tidak diajarkan sebagai sebuah mata pelajaran khusus, tetapi diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Termasuk dalam mata pelajaran civic education. Pembentukan karakter di Jepang dilakukan melalui penanaman nilai secara praktis dan terintegrasi melalui mata pelajaran khususnya civic education." Pendidikan karakter di Negara Jepang tidak hanya dilakukan di sekolah - sekolah tetapi juga di dalam kehidupan masyarakat.

## REFERENSI

- Ramli, Murni, 2006, *Pendidikan Moral di Jepang*,  
<http://murniramli.blogspot.com/>, diunduh 28 Mei 2017
- Ramli, Murni, 2009, *Pendidikan Moral Orang Jepang*, Terdapat  
pada [http://murniramli.wordpress.com /2009/01/03/  
pendidikan-moral-orang-jepang/](http://murniramli.wordpress.com/2009/01/03/pendidikan-moral-orang-jepang/), diunduh 28 mei 2017
- Befu, Harumi.1981. *Japan: An Antropological Introduction*.  
Tokyo: Charles E. Tuttle Co. Danandjaja, James.1997.  
*Folklor Jepang*
- Davies, I., Mitsuharu, M. Gillian, H.T. (2010). Citizenship  
Education in japan. Citizenship, social and economics  
Education, 173-174.
- Kerr, D. (1999) Citizenship Education in The Curriculum: An  
International Riview. The school Field, 10 (3/4), hlm. 5-31
- Dilihat dari Kacamata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.  
Kawada, Kan. 1996.
- Atarashii Shakai Rekishi*. (Sejarah Masyarakat Baru) Tokyo:  
Tokyo Shoseki Nihongo Kyouiku Gakkai,1988.
- Nihon Jijoo Shiriizu Nihon no Rekishi*. (Pengantar Sejarah  
Jepang).Tokyo: Bonjinsha.(terjemahan dalam bahasa  
Indonesia diedit oleh I Ketut Surajaya). Nitobe, Inazo.  
2008.
- Bushido Jiwa Jepang* Surabaya : Era Media Publisher Nasution,  
S. 1995
- Suryohadiprojo, Sayidiman. 1987 *Belajar Dari Jepang*. Jakarta.  
UI Press Susilo, Taufik Adi. 2010.

*Spirit Jepang* Jogjakarta. Ae-Ruz Media Grup Tukiyo, 2012.  
Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter di Jepang Serta  
Perbandingannya Dengan di Indonesia. FKIP. Universitas  
Widya Dharma Klaten

Tatang. 2012. Pendidikan Karakter di Jepang dan Indonesia.  
Makalah: Disampaikan dalam “Seminar Nasional dan  
Workshop Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Karakter” di  
Bandung, 11 November 2012.

